

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pernyataan Lamont, tinjauan pustaka atau analitis dari penelitian ilmiah adalah cara untuk menetapkan, mengatur dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam konsep atau kerangka teoritis sebagai gambaran singkat atau keadaan seni keterlibatan ilmiah yang ada dengan topik penelitian. Sehingga perdebatan teoretis utama atau relevansi dengan pertanyaan sebuah penelitian yang telah digunakan orang lain dapat di tanggapinya oleh pembaca.²⁰ Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang penulis gunakan berupa dokumen, jurnal dan artikel sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun tinjauan pustaka tersebut sebagai berikut:

Pertama, buku yang berjudul “*The Indo-Pacific: Trump, China, and the New Struggle for Global Mastery*” oleh Richard Javad Heydarian.²¹ Buku ini menjelaskan tentang kebangkitan China di kawasan Indo-Pasifik dan persaingan strategi AS yang dipimpin oleh Donald Trump dan China yang dipimpin oleh Xi Jinping akibat dominasi China di kawasan. Buku ini membawa wawasan yang kredibel tentang dilema yang dihadapi banyak negara di lingkaran kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini disesuaikan bagi mereka yang ingin account informatif dengan panorama dan analisis mendalam dari negara berkembang di Indo-Pasifik. Wilayah Indo-Pasifik adalah teater utama kontes abad ini yakni persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China.

Kedua, dokumen yang berjudul “*Regional Responses to US-China Competition in The Indo-Pasifik; Study Overview and Conclusion*” oleh Bonny Lin,

²⁰ Christopher Lamont. (2015). *Research Methods in International Relation*. Singapura: Sage Publication. Hlm 66

²¹ Richard Javad Hadriyan. (2020). *The Indo-Pacific: Trump, China, and the New Struggle for Global Mastery*. Singapura: Palgrave Macmillan

Michael S. Chase, Jonah Blank, dkk.²² Kajian ini mencoba untuk menjelaskan beberapa hal seperti bagaimana negara-negara di Indo-Pasifik khususnya Asia Tenggara memandang persaingan pengaruh Amerika Serikat dan China di wilayah masing-masing. Kedua, melihat seberapa efektif Amerika Serikat dapat bersekutu dan bermitra dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sebagai upaya mencari pengaruh dan mitra dalam bekerjasama dan menekan dominasi kekuatan China di Kawasan Indo-Pasifik.

Ketiga, dokumen yang berjudul “*Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter*” oleh Irwan Sinaga dkk dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (BPPK).²³ Dokumen ini menjelaskan tentang Indo-Pasifik dalam konteks geopolitik dan geostrategis telah selama lebih dari satu dekade. Diskusi tentang Indo-Pasifik mendapatkan momentum di tengah perubahan geopolitik global dan regional serta lanskap geoekonomi yang begitu cepat dengan mengembangkan konsep bahkan kebijakan yang berkaitan dengan Indo-Pasifik sesuai dengan perspektif dan kepentingan negara masing-masing yang meunculkan pertentangan. Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya mengambil langkah aktif dan strategis dengan mengembangkan *ASEAN Outlook on Indo Pacific* untuk menghindarkan kawasan Asia Tenggara menjadi ajang bagi perebutan kekuasaan di antara negara-negara besar.

Keempat, Artikel jurnal yang berjudul “*China’s Indo-Pacific Strategy: The Problems of Success*” oleh David Scott.²⁴ Artikel ini menggambarkan, menjelaskan, dan mengevaluasi strategi China di Indo-Pasifik. Hasil penemuan artikel tersebut bahwa China telah cukup berhasil dalam berusaha untuk menguasai sebagian besar Laut China Selatan dan Laut China timur, dan dari sana penetrasi ke Pasifik Barat dan Samudra Hindia. Serta keberhasilan ini menciptakan alasan untuk kegagalan karena berbagai negara di kawasan ini semakin bekerja sama untuk membatasi

²² Bonny Lin, dkk. (2020). *Regional Responses to US-China Competition in The Indo-Pacific; Study Overview and Conclusion*. Santa Monica: RAND Cooperation

²³ Irwan Sinaga. (2019). *Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (BPPK)

²⁴ David Scott. (2019). China’s Indo-Pacific Strategy: The Problems of Success. *Journal of Territorial and Maritime Studies*. Vol. 6. No. 2

China.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “*Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia*” oleh V.L. Sinta Herindrasti dari Universitas Kristen Indonesia jurusan Hubungan Internasional.²⁵ Artikel jurnal ini menjelaskan tentang kemunculan terminologi Indo-Pasifik sejak tahun 2007 hingga 2013 yang menciptakan dinamika “ketegangan” baru antar berbagai aktor di kawasan Indo- Pasifik. Jurnal ini mencerminkan adanya diskursus transformasi geopolitik baru di kawasan Indonesia dengan posisi strategisnya juga terlibat aktif dalam pengembangan diskursus dan diplomasi Indo-Pasifik.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kepada Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam merespons dominasi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Saat ini, China adalah negara pengeksport terbesar di dunia, konsumen barang-barang kebutuhan pokok terbesar dan sumber utama investasi terutama dalam infrastruktur strategis di Asia dan di seluruh dunia berkembang. Kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik melahirkan konstruksi geopolitik baru yang secara fundamental mencerminkan kepekaan banyak negara-negara besar untuk intervensi. Misalnya pada Rivalitas China-Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

Merespon rivalitas tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di lingkaran kawasan Indo-Pasifik merasa perlu untuk menjadi stabilitator dalam penengah konflik China-Amerika Serikat. Melihat kekuatan tugggal China di kawasan Indo-Pasifik menjadi akar masalah konflik Rivalitas. Untuk itu, Indonesia mulai membangun kerjasama bilateral antara Indonesia-Amerika Serikat sebagai perwujudan stabilitator kawasan. Indonesia juga bergerak atas dasar menjaga kepentingan negaranya yang memiliki imbas dari konflik Rivalitas China-Amerika khususnya di selat malaka dan kepulauan Natuna. Dengan kerjasama yang dibangun antara Indonesia-Amerika setidaknya dapat membantu Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Adapun kerjasama yang dibangun antara Indonesia-Amerika

²⁵ V.L. Sinta Herindrasti. (2019). Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia. (2019). *Jurnal Asia Pacific Studies*. Vol. 3. No. 1. Hlm 43-51

Serikat meliputi kerjasama politik, kerjasama ekonomi dan kerjasama pertahanan.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu Teori Geopolitik, Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerjasama Bilateral untuk menganalisis kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menghadapi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Teori ini digunakan untuk menganalisa kerjasama Indonesia-Amerika Serikat yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

2.2.1 Geopolitik

Menurut Hagan, istilah geopolitik diperkenalkan dalam *Foundations for a System of Politics* (1920) untuk hal-hal yang menyangkut situasi wilayah negara, kondisi dan bentuk, serta sumber daya alam dan fisik.²⁶ Kjellén-lah yang menciptakan kata tersebut dan saat itu, aliran pemikiran geopolitik di Jerman merasa cocok dengan istilah tersebut.

Dalam *Geopolitics: The Geography of International Relations* (2003), geopolitik dipahami Saul Bernard Cohen sebagai analisis interaksi antar sisi, di satu sisi adalah keadaan geografis dan perspektif dan di sisi lain adalah proses-proses politik.²⁷ Keadaan ini terdiri dari ciri-ciri dan pola geografis serta wilayah berlapis yang dibentuknya. Proses politik termasuk kekuatan yang beroperasi di tingkat internasional dan di kancah domestik yang memengaruhi perilaku internasional. Keduanya (keadaan geografis dan proses politik) bersifat dinamis saling memengaruhi. Peter J. Taylor dalam *Geopolitics, Political Geography and Social Science* (2000) berusaha untuk meletakkan geopolitik ke dalam beberapa perspektif institusional.²⁸ Sebagai sebuah sub disiplin ilmu, geopolitik amatlah kecil sekalipun berubah dalam ukuran lintas negara dan waktu.

Tabel 1. Ciri-Ciri Geopolitik Klasik

Kedudukan istimewa penulis (privileged position of author)	Kulit putih, laki-laki, golongan atas (elite) dan berpengetahuan Barat
---	---

²⁶ Charles B Hagan. (1942). *Geopolitics. The Journal of Politics*. Vol.4. No.4. Hlm 478-490.

²⁷ Saul Bernard Cohen. (2003). *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Maryland: Rowman & Littlefield.

²⁸ K. Dodds and D. Atkinson. (2011). *Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought*. London: Routledge. Hlm 375-379.

Perspektif maskulinitas	Semua yang terlihat dan diketahui (all seeing and all knowing)
Pelabelan/klasifikasi	Wilayah memberikan nilai dan makna
Anggapan terhadap teori dan objektif dan sejarah	Kebenaran universal digunakan untuk menjustifikasi kebijakan luar negeri
Penyederhanaan (simplification)	Sebuah slogan (carcphrase) untuk membantu perkembangan dukungan publik
Negara-sentris (state-centric)	Politik kedaulatan negara territorial

Sumber: Diolah Colin Flint (2006)

Dalam tatanan dunia baru masa kini, menurut Ó Tuathail yang dikutip dari Priyono & Yusgiantoro (2017), spesifikasi hubungan pasca-Perang Dingin antara geografi, kekuatan, dan tatanan dunia bervariasi sebagai khayalan geopolitik, bersaing satu sama lain untuk membatasi “geopolitik baru” (new geopolitics).²⁹ Bagi sebagian orang, berakhirnya Perang Dingin telah memungkinkan kemunculan tatanan geopolitik baru yang didominasi oleh pertanyaan dan isu-isu geoekonomi; sebuah dunia di mana globalisasi kegiatan ekonomi dan arus perdagangan global, investasi, uang, dan kesan (images) memperbarui negara, kedaulatan, dan struktur geografis planet ini.

Tabel 2. Diskursus Geopolitik

Diskursus	Aktor Intelektual	Kosakata Dominan
Geopolitik Imperials	Alfred Mahan	Kekuatan Laut (seapower)
	Friedrich Ratzel	Ruang hidup (Lebensraum)
	Halford Mackinder	Kekuatan daratan (Heartland)
	Karl Haushofer	Kekuatan daratan (Heartland)
	Nicholas Spykman	Daerah Batas (Rimlands)
Geopolitik pada Masa Perang Dingin	George Kennang	Pembendungan (Containment)
	Soviet dan para pemimpin Barat/militer	Negara-negara di Dunia Pertama/ Kedua/Ketiga sebagai satelit dan dominos; Blok Barat vs Timur
	Mikhail Gorbachev	New political thinking
	Francis Fukuyama	The end of history

²⁹ Gearóid Ó Tuathail and Paul Routledge. (1998). *The Geopolitics Reader*. London: Routledge. Hlm 2.

Geopolitik pada masa Tatanan Dunia Baru	Edward Lutwak	Statist geoeconomics
	George Bush	AS memimpin tatanan dunia baru
	Para pemimpin G-7, IMF, WTO	Liberalisme transnasional/neoliberalisme,
	Perencana Strategis di Pentagon dan NATO	Negara-negara nakal, perlindungan nuklil, teroris
	Samuel Huntington	Benturan peradaban (Clash of Civilizations)
Geopolitik Lingkungan	Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan	Pembangunan berkelanjutan
	Al Gore	Inisiatif lingkungan strategis
	Robert Kaplan	Coming Anarchy
	Thomas Homer-Dixon	Kelangkaan lingkungan
	Michael Renner	Keamanan Lingkungan

Sumber: Diolah Tuathail (2020)

Dalam konteks negara modern, Priyono & Herman menjelaskan bahwa konsep kesadaran ruang terwujud dalam klaim kedaulatan, ditandai batas negara (boundary) yang dilengkapi seperangkat hukum dan aparat untuk menjamin keamanan dan kedaulatannya. Saat ini, popularitas geopolitik naik daun menjadi sarana penggambaran dan pertarungan konflik kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara baru untuk memahami perubahan geopolitik. Pada kenyataannya, geopolitik tidak hanya berbicara tentang hubungan eksternal negara melainkan pelibatan yang lebih menyeluruh dari geopolitik sosial bahkan geoekonomi.

2.2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dalam menjalankan hubungan internasional adalah hal yang harus dimiliki oleh suatu negara. Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain.³⁰ Seperti yang dituliskan Paul Seabury dalam buku yang di tulis KJ.Hostli, ide kepentingan nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan dalam tindak hubungan luar negerinya. Dengan

³⁰ W. David. Clinton. (1986). The National Interest: Normative Foundations. *The Review of Politics*. Vol. 48, No.4. Hlm 495-519

istilah yang lebih baik kita mungkin dapat menyebutkannya konsep kepentingan nasional yang bersifat normatif dan kewarganegaraan untuk serangkaian kepentingan suatu negara.

Menurut T. May Rudy, kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.³¹ Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa ialah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (security) dari kesejahteraan (prosperity) pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.

Sedangkan, menurut Morgenthau, “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.”³² Dalam konsep kepentingan nasional menurut Hans J Morgenthau bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan minimum dari suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik, militer dan budaya dari gangguan negara lain.

Kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yakni kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama dan sangat penting keberadaannya bagi suatu negara. Contohnya suatu negara akan melindungi kedaulatannya, mempertahankan wilayah dan harga diri negara tersebut. Sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang berasal dari masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat. “Seluruh negara memiliki kepentingan untuk mencari kekuasaan atau pengaruh”.³³

Donald E. Nuechterlein dalam bukunya yang berjudul *National Interests and*

³¹ T. May Rudy. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika Aditama: Bandung

³² Hans J Morgenthau. (1955). *Politics Among Nations*. New York: Alfred A. Knopf. Hlm 51.

³³ Miroslav, Nincic. (1999). *The National Interest and Its Interpretation. The review of Politics*. Vol. 61. No. 1. Hlm 29-55

foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision- making menjabarkan bahwa terdapat empat dasar dari kepentingan nasional yaitu:⁴³

- Kepentingan Pertahanan: perlindungan untuk negara-bangsa dan masyarakatnya terhadap ancaman serangan fisik secara langsung dari bangsa lain dan atau ancaman secara eksternal yang mempengaruhi sistem pemerintahan dari negara tersebut.
- Kepentingan Ekonomi: peningkatan kesejahteraan ekonomi negara bangsa melalui hubungannya dengan negara-negara lain.
- Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order*): pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa dapat merasa aman dan di mana masyarakat dan perdagangannya dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya.
- Kepentingan Ideologi: perlindungan dan pemajuan sekumpulan nilai atau norma masyarakat dari negara-bangsa yang diyakini baik secara universal.

Dalam penelitian ini, kepentingan nasional Indonesia disesuaikan dengan sistem politik Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya Tujuan Nasional memiliki tiga makna sebagai berikut: Pertama, memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun.

Kedua, berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai baik lingkungan global maupun dalam negeri.

Dengan begitu, kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok yaitu Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu.

Kepentingan nasional nantinya akan menjadi acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (grand strategy) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional bersifat dinamis akibat adanya dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik serta interaksi antar masyarakat. Indonesia selalu mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan dalam pergaulan dunia melalui politik luar negeri yang bebas aktif disertai prinsip menjaga kemurnian sebagai negara nonblok. Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara-cara dialog dalam menangani masalah internasional turut serta memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi aktif dalam meredakan ketegangan internasional.

Indonesia juga merupakan negara demokarasi guna mewujudkan kesetaraan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah melalui kesepakatan Bersama sebagai bagian dari diplomasi dengan berpedoman pada upaya untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam rangka meredam konflik. Indonesia berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan dalam hubungan internasional baik bilateral maupun multilateral.

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan

kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Sehingga kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai situasi di mana para pihak setuju untuk bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan baru bagi masing-masing peserta yang tidak tersedia bagi mereka dengan tindakan sepihak dengan biaya tertentu.

Pada umumnya, kerjasama internasional yakni meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara.³⁴ Kerjasama tersebut dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti:

- Kerja sama bilateral: kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dijalin oleh dua negara atau lebih, biasanya didasari oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya kerja sama pada sektor ekonomi atau pariwisata.
- Kerja sama regional: kerja sama regional adalah suatu bentuk kerja sama antarnegara di mana negara-negara tersebut berada dalam satu wilayah atau satu kawasan saja. Misalnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yang tergabung dalam kelompok ASEAN. Sektor kerja sama yang dilakukan biasanya pada sektor politik, ekonomi dan pertahanan.
- Kerja sama multilateral: kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak terbatas pada status negara serta wilayah negara tersebut. Anggota yang mengikuti kerja sama ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu anggota aktif dan anggota utama. Contoh kerja sama pada hal ini adalah Organisasi Konferensi Islam yang sering disebut dengan OKI.

Dalam penelitian ini, hubungan internasional berkaitan dengan hubungan bilateral antara kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam melawan kekuatan China di Kawasan Indo-Pasifik. Interaksi antar aktor ini yang kemudian

³⁴ Yanuar Ikbar. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 273

membuat peneliti menggunakan teori-teori hubungan internasional dalam menjelaskan penelitian.

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan kedua negara dan untuk mencapai tujuan bersama. Bilateralisme berpacu pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara, contohnya: 1. Penandatanganan atau perjanjian. 2. Tukar menukar Duta Besar. 3. Kunjungan kenegaraan. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral.

Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara dan unilateral; ketika satu negara berlaku semauanya sendiri (freewill).³⁵ Kerjasama dapat berjalan melalui berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan interaksi berbentuk kerjasama terjadi pada dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan.

Model kerjasama lainnya dilakukan oleh masing-masing negara yang diwadahi organisasi dan perjanjian internasional. Beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral.

Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi. Pola kerjasama bilateral meliputi proses:

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan.

³⁵ Teuku May Rudy. (2002). *Studi Strategi Dalam Transformasi Sistem Informasi Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Rafika Aditma . Hlm 127

4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi.³⁶

Isu utama dalam kerjasama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.³⁷

Jadi, kerjasama tidak dapat terjadi apabila suatu negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Sehingga yang terasa bahwa kerjasama akan tercipta karena adanya ketergantungan dari masing-masing negara untuk mencapai kepentingan internalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing. Oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.³⁸

Kishan S. Rana mengatakan bahwa kerjasama bilateral dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara.³⁹ Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

- Bidang politik: kerja sama internasional akan membuat negara bersama-sama saling berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing.
- Bidang ekonomi: kerja sama internasional yang terjalin akan membuat negara saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses ekspor serta impor.

³⁶ Yanyan Mochamad Yani & Perwita. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Hlm. 42.

³⁷ *Ibid.* Hlm 33-34

³⁸ Teuku May Rudy.(2002). *Studi Strategi Dalam Transformasi Sistem Informasi Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Rafika Aditma. Hlm 125

³⁹Kishan S Rana. (2002). *Bilateral Diplomacy*. New Delhi: Manas Publications. Hlm 15-16

- Bidang sosial budaya: membuat antarnegara menjadi saling melengkapi. Akan tetapi tetap berpedoman pada kepribadian yang sudah dimiliki oleh masing- masing negara.
- Bidang pertahanan dan keamanan: melakukan pelatihan militer bersama guna meningkatkan kualitas keamanan serta pertahanan suatu negara.
- Bidang pendidikan: melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menimba ilmu sehingga pada nantinya akan membawa dampak positif bagi negara.

2.3 Kerangka Berpikir

Kawasan Indo-Pasifik merupakan sebuah kawasan yang tengah di perebutkan negara-negara di dunia. Pasalnya kawasan Indo-Pasifik memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan ekonomi yang melimpah ruah. Kawasan Indo-Pasifik juga dikelilingi oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, India, Jepang, negara-negara Asia Tenggara hingga lebih dari 50 negara yang berada pada lingkaran kawasan Indo-Pasifik. Dengan keluasan wilayah dipenuhi dengan kekuatan ekonomi membuat kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan tersibuk dan kawasan yang dilirik negara-negara diantaranya dalam hal kepemilikan kedaulatan.

Salah satu konflik atas perebutan wilayah Indo-pasifik adalah persaingan China-Amerika Serikat yang dilatarbelakangi atas adanya dominasi kekuatan China di Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai salah satu negara non-blok dengan politik bebas aktif yang berada di Kawasan Indo-Pasifik mencoba untuk menstabilisasikan kawasan atas dominasi China dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat. Harapannya agar persaingan antar dua negara besar China dan Amerika menjadi damai dan tidak merusak tantangan ekonomi dan keamanan wilayah negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia sebagai negara politik bebas aktif yang menjunjung nilai tinggi perdamaian mencoba untuk memberikan solusi terbarukan akan ketegangan wilayah kawasan Indo-Pasifik. Dengan berbagai kepentingannya juga Indonesia tetap ingin menjadikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang stabil tidak didominasi oleh satu negara tunggal seperti China. Potensi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik hanya akan memunculkan ketegangan, kerusuhan dan

pemasalahan.

Lewat kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia berharap kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan stabil. Potensi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik setidaknya dapat menekan kekuatan China demi menciptakan perdamaian dan perdagangan yang sehat. Indonesia berkolaborasi dengan Amerika Serikat berdasarkan dua kepentingan kerjasama yakni kerjasama politik, kerjasama ekonomi dan kerjasama pertahanan. Harapan dari kerjasama yang dijalankan kedua negara pada prospek stabilitas kawasan Indo-Pasifik atas dominasi kekuatan China yang semakin terlihat bangkit dan berpotensi menciptakan beribu ancaman dan peluang.

Bagan 1. Kerangka Berfikir

